

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2015). the Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, and External Pressure Towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada*, Vol 28. No. 1. 62–83.
- Aldina, I. (2016). Pengaruh Kualitas DIPA,Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran. *Jurnal Onlien Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, No. 1. 35–40.
- Amalia, A. F. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 1.
- Ananda, F. P. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal , Transparansi dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*, Vol. 1, No. 1
- Apriana, D. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Derah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten Dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol. 11. No. 1. 68–79.
- Damanik, C. H., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2018). Analisis Prosedur Pemungutan Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi* Vol. 1. No. 04. 205–215.
- Davis, J. H. (1997). Towar A Stewardship Theory Of Management. *International Journal of Plant Science*, Vol. 158, S65–S80.
- Erryana, V. (2016). Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Derah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 5. No. 1.
- Fontanella, (2014). Pengaruh Desentralisasi fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mataram*, Vol.3. No. 1. 1–65.

- Habibi, M. (2018). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Hafidh, A. A. (2013). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora, Universitas Negeri Yogyakarta*. Vol.18. No. 2. 109–120.
- Irmawati, F. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Politik Dinasti, dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012 – 2013. *Jurnal Akuntansi & Investasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Kaunang, P. D. (2013). Penerapan Asas Efisiensi Dan Asas Efektivitas dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi* Vol. 1. No. 1. 136–148.
- Moisiu, A. (2014). Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol.109. 459–463.
- Mudhofar, K. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol. 17 No. 2. 176–185.
- Muraiya, N. (2018). Pengaruh desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Universitas Negeri Aceh*. Vol. 3. No. 2. 236–253.
- Nurdiana N, Y. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Kementerian Keuangan Indonesia, Publikasi*.
- Nurhidayati, S. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung*, Vol. 7. No. 1. 13–19.
- Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol. 19. No.3. 463.
- Permana, I. A. (2015). Pengaruh Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Study Empiris Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mataram*
- Pujiati, A. (2004). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era

- Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi, Universitas Negeri Semarang* Vol. 5 No.33. 61–70.
- Purbasari, H., & Andy Dwi Bayu Bawono. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta* Vol. 2. No.2. 102–108.
- Putra, A. P. (2019). Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Universitas Mataram* Vol.2. No.2.
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting, Universitas Diponegoro* Vol.6. No.1. 298–310.
- Richard, B. (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Safaruddin, dkk (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Hali Oleo*. Vol. 1 No. 1. 93–105.
- Salma, N. (2018). Pengaruh Politik Dinasti Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kinerja Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah*, Vol. 15. No. 2,
- Septiani, R. (2015). The Influence Independent Regional, Dependence Regional, Effectiveness Realization Income Original Regional And Capital Expenditure Toward Accountability Of Local Government Financial Reporting. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana*.
- Sugiarta, B. (2018). Pengaruh Tingkat Kemandirian daerah Dan Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Lampung* Vol. 3. 224–234.
- Suyanto, S. (2017). Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom. *Jurnal Akuntansi, Universitas Dr. Soetomo*, Vol.1 No. 1. 1–21.
- Syauqi, M., dkk (2017). Strategi Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Pengelolaan APBD. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor* Vol. 9. No. 1. 1–16.

Tamawiy, J., dkk (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, Universitas Sam Ratulangi*.

Yulianah, S. (2018). Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan daerah Terhadap Perumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

Zakhiya, M., & Tahar, A. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Universitas Mataram Vol.12 No. 1. 88-99*.

Al-Quran Surah Al-Khafi Ayat 49

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

KPK Gelar Rekonstruksi Perkara Kasus Suap Dana Perimbangan  
<https://www.cnnindonesia.com/> Diakses 23 Juli 2019 Pukul 20.00 WIB

BPK. (2016). Siaran pers badan pemeriksa keuangan, <https://www.bpk.go.id/>. Diakses 23 Juli 2019 pukul 20.40

